

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, bertujuan menyelenggarakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kementerian Kehutanan bertanggung jawab membangun sistem pembangunan kehutanan yang responsif gender. Secara konkrit, Kementerian Kehutanan harus dengan sengaja dan terencana, mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, artinya kementerian kehutanan harus memastikan laki-laki dan perempuan yang ada di dalam bidang kehutanan mempunyai peran, mendapatkan akses, manfaat dan melakukan kontrol yang adil dalam pembangunan kehutanan.

Kesetaraan gender adalah perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama serta memiliki kondisi yang sama dalam pemenuhan hak-haknya, sebagai manusia dan mewujudkan kemampuannya untuk berperan aktif

dalam pembangunan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002). Tanpa disadari, biasanya secara sosial perempuan dan laki-laki memiliki status dan kondisi yang berbeda dalam pemenuhan hak maupun kewajibannya untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan, sehingga menimbulkan banyak terjadinya kesenjangan gender. Seperti halnya pada industri hasil hutan kayu, partisipasi perempuan masih sangat kurang, dimana sebenarnya perempuan merupakan aset pembangunan yang potensial dan dapat diperhitungkan apabila diberdayakan dengan memegang peran dan posisi yang strategis, sehingga kecenderungan melaksanakan kemitrasejajaran gender relatif besar (Anonim, 2005).

Jumlah pekerja perempuan dari tahun ketahun meningkat cukup tajam. Tahun 2004 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pekerja perempuan berjumlah 33.141.000 orang dari total sekitar 93.722.000 pekerja Indonesia. Kaum perempuan bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, baik di sektor informal maupun di sektor formal (Adisu, E dan Jehani, 2007).

Namun demikian, eksistensi sektor industri memberikan alternatif dalam membuka kesempatan kerja perempuan yang akhirnya mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan ekonomi. Salah satu contoh industri yang bergerak di bidang pengelolaan hasil hutan kayu adalah CV Kota Agung. Industri yang terletak pada Kecamatan Tegineneng Provinsi Lampung ini, merupakan industri yang menghasilkan kayu lapis sebagai produk utamanya, dimana dalam pengelolaanya membutuhkan karyawan laki-laki dan perempuan.

Alasan dipilihnya CV Kota Agung sebagai tempat penelitian adalah industri ini merupakan industri yang masih bertahan dan terus berkiprah atau berkembang. Industri ini merupakan industri skala kecil menengah yang mapan, dimana jumlah karyawannya lebih dari 20 orang (BPS, 1993 dalam Priyadi dan Astuti, 2003) sehingga masih banyak topik yang dapat dijadikan sebagai penelitian dan salah satu contoh adalah isu tentang peran gender.

Di CV Kota Agung berdasarkan data sekunder yang bersumber dari industri tersebut, jumlah karyawannya pada tahun 2010 yaitu sebanyak 131 orang karyawan, yang terdiri dari 62 karyawan laki-laki dan 69 karyawan perempuan. Industri CV Kota Agung telah mengalami penurunan jumlah karyawan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 280 karyawan menjadi 131 karyawan, dikarenakan CV Kota Agung mengalami krisis bahan baku dan krisis keuangan global.

Jumlah karyawan yang hampir sama rata antara karyawan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan usaha industri kayu lapis, dimana berbagai jenis spesifikasi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh karyawan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemampuannya, menyebabkan adanya perbedaan peranan yang dilakukan antara karyawan laki-laki dan perempuan baik dalam menghasilkan produk, kinerja karyawan dan juga upah yang didapat. Berdasarkan perbedaan tersebut maka dilakukannya penelitian mengenai “Kesetaraan Gender Pada Pengelolaan Usaha Kayu Lapis di CV Kota Agung Kecamatan Tegineneng”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji peran gender dalam pengelolaan usaha kayu lapis di CV Kota Agung Kecamatan Tegineneng
2. Mengetahui spesifikasi kerja yang dilakukan gender

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dan instansi terkait untuk melakukan suatu kesetaraan gender.
2. Sebagai masukan untuk merumuskan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam pengarusutamaan gender yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri khususnya industri perkayuan.
3. Dapat memberikan kemampuan dan kepekaan bagi karyawan CV Kota Agung tentang bagaimana kiprah perempuan memiliki peran ganda serta sebagai masukan dalam upaya mendapatkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
4. Dapat memberikan informasi pada perusahaan CV Kota Agung tentang kualitas dan hubungan baik antara karyawan laki-laki dan perempuan serta dapat mengetahui sejauh mana kesetaraan gendernya.

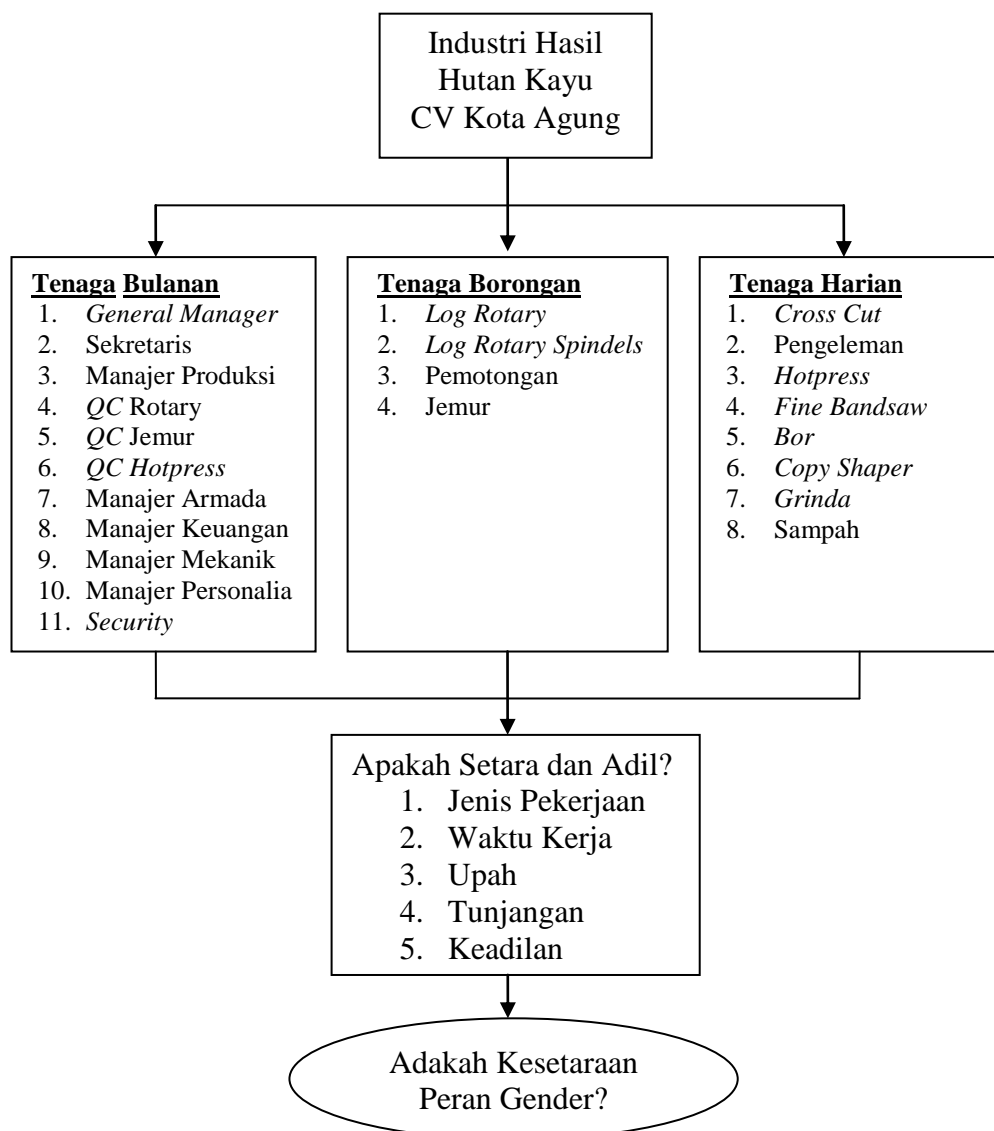
D. Kerangka Pemikiran

Industri CV Kota Agung merupakan industri yang bergerak di bidang usaha pengolahan hasil hutan kayu lapis (*plywood*) yang berada di Kecamatan Tegineneng. Industri tersebut merupakan salah satu mata pencaharian sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar industri dengan bekerja sebagai buruh/ karyawan. Berdasarkan kondisi tersebut, dimana CV Kota Agung merupakan industri hasil hutan kayu yang mempekerjakan sejumlah karyawan laki-laki maupun perempuan yang berada di sekitar CV Kota Agung untuk bekerja sebagai buruh/ karyawan, sehingga diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pembagian jenis pekerjaan dan posisi karyawan. Berdasarkan peran gender yang dilakukan dalam pengelolaan usaha *plywood* agar mempengaruhi keberhasilan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian survei, wawancara dan penyebaran kuisioner yang ditujukan kepada karyawan CV Kota Agung.

Dengan dilakukannya penelitian mengenai peran dan posisi gender berdasarkan spesifikasi pekerjaannya, maka dampak peran gender seperti penyetaraan hak dan kewajiban pada setiap karyawan yang sangat penting dalam pengelolaan kayu lapis di CV Kota Agung dapat diketahui.

Pembagian bidang kerja dalam pengelolaan usaha kayu lapis dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuannya baik dari bidang manajemen usaha maupun kinerja karyawan. Selain itu dengan adanya pembagian bidang kerja maka dapat terlihat adanya peran gender yang terjadi pada industri

tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan cara tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dilihat dari jenis pekerjaan, waktu kerja, upah, fasilitas, tunjangan dan keadilan yang didapat pada kedua karyawan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka bagan kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian